

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku ;

- Abdurrahman, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Pidana Baru di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1980,
- Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum di Indonesia*, Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), Jakarta, 1982
- Achmad S. Soema. *Surat Dakwaan, Suatu Memahami isi Serta Peranannya KUHAP, disertai Beberapa Putusan Mahkamah Agung*. Bandung. Sinar Baru. 2007
- Amir Syamsuddin, *Integritas Penegak Hukum; Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2008.
- Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Asadullah Al-Faruq, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: PT Pustaka Yudistia, 2009
- Bambang, Sunggono dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Binziad Kadafi, dkk, , *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi; Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2001
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1985
- Didi Kusnadi, *Bantuan Hukum dalam Islam*, sinar media. yogyakarta 2006.
- Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia; Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara*, PT Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, Jakarta, 2011.
- Frans, Hendra Winarta, *Bantuan Hukum; Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, PT Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia, Jakarta 2000.
- Frans Hendra Winarta , *Pro Bono Publico; Hak Konstitusional fakir Miskin Untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 2009

- H. A. Sukris Sarmadi, *Advokat; Litigasi dan Non Litigasi Pengadilan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Heri Tahir. *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo. 2010.
- Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Terjemahan dari Kitab Al-Thuruq al-Hukumiyyah fi al-Siyasah al-Syari'iyah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Kaelan, Achmad Zubaidi, *Pendidikan Kewarganegaraan, Paradigma*, Yogyakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2010.
- Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan*, Papas Sinar Sinanti, Jakarta, 2013.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan; Edisi ke dua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mahfud. MD. *Politik Hukum untuk Independensi lembaga Peradilan*. 1997
- Moh.Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum & Pidana Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Cetakan III, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Nasikun , *Pendekatan Untuk Mempelajari Sistem Sosial Indonesia*. Yogyakarta; Fakultas Sosial Politik UGM thn. 1974.
- O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Cetakan I, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2006.
- Ramelan. *Hukum Acara Pidana Teori dan Implementasinya*. Jakarta: Sumber Ilmu Jaya. 2006.
- Rahmat Rosyadi dan Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Romli, Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Putra A. Bardin, Jakarta, 1996.

- Ropaun, Rambe, *Teknik Praktek Advokat*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2001.
- Rusli, Muhammad, , *Lembaga Pengadilan Indonesia Beserta Keputusan Kontroversial*, UII Yogyakarta Press, Yogyakarta, 2012.
- Sartono dan Bhektin Suryani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*, Dunia Cerdas, Jakarta, 2013.
- Salman Luthan. *Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparat keadilan*. Yogyakarta. 2005
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum; Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Jakarta, 2009.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta. 1986.
- Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah 13-terjemahan*, Bandung, Alma'arif, 1987..
- Syprianus Aristeus, *Penelitian Hukum Tentang Perbandingan Antara Penyelesaian Putusan Praperadilan Dengan Kehadiran Hakim Komisaris Dalam Peradilan Pidana*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2007.
- Shiharta, Arief B, *Peranan Praktisi Hukum dalam Perkembangan Hukum di Indonesia*. Bandung ; Puslitbangkum, 1999
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Cetakan I, YLBHI dan PSHK, Jakarta. 2009.
- Yesmil, Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana; Konsep, Komponen, & Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjajaran, 2009.
- Yusuf Shaleh, *Kamus Hukum*, Penerbit Citra Umbara, Bandung, 2008

B. Peraturan Per Undang-Undangan ;

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang RI Nomor 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 1982 Nomor 76).

Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165).

Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49).

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157).

Undang-undang RI Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104)

Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82).

Peraturan Pemerintah RI No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214).

Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 yang dikeluarkan pada tanggal 30 Agustus 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum berikut dengan Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Umum dan Lampiran B tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama. Berikut dengan petunjuk pelaksanaannya yakni : Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1/dju/ot 01.3/viii/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun

2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran A Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.

Yurisprudensi yakni Putusan MA No. 1565 K/Pid/1991 (16 September 1993).

Kode Etik Advokat di sahkan pada tanggal 23 Mei 2002

C. Jurnal / Artikel Ilmiah ;

Putu Sekarwangi Saraswati, *Implementasi Hak Tersangka Untuk Memperoleh Bantuan Hukum di Wilayah Hukum Polda Bali*) Tesis, Bali, Udayana, 2013.

Rijal Yohanda, *Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Cuma-Cuma Kepada Tersangka yang Tidak Mampu Pada Proses Penyidikan Perkana Pidana Studi di Wilayah Hukum Poltabes Kota Padang* Tesis, Universitas Andalas, 2008

E. Internet ;

Kudus Dalam Angka : <http://kuduskab.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/2017> April 2016. Jam 13.44 WIB.

Liaamani “*Kerangka Teoritis*” <http://liaamami.blogspot.co.id/p/kerangka-teoritis.html> 24 Mei 2016. 23.00 WIB.